



## **Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan**

**Jakarta, 14 Agustus 2025** - Pada hari ini, bertempat di Aula Zamhier Islamie, IPDN Kampus Jakarta, telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Dalam Negeri dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kementerian Keuangan. Penandatanganan PKS dilakukan oleh Halilul Khairi, Rektor IPDN dan Sudarto, Plt. Kepala BPPK. Kegiatan ini dihadiri pula oleh jajaran pimpinan di lingkungan IPDN dan BPPK.

Kegiatan penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut kemitraan strategis antara IPDN dan BPPK, juga menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, guna menyiapkan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang lebih berkualitas yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat pengguna jasa. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur sipil negara lulusan IPDN tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia serta meliputi berbagai sektor kepentingan masyarakat.

Tema yang diangkat dalam PKS ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Sertifikasi Kompetensi, dan Kajian di Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan di Bidang Keuangan Negara. Dengan menyinergikan pengetahuan di bidang keuangan negara dan kompetensi teknis di bidang pemerintahan dalam negeri, khususnya kompetensi terkait keuangan daerah, diharapkan akan dapat memberikan layanan berdampak kepada masyarakat yang lebih transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala BPPK menyampaikan apresiasi atas kerja sama IPDN dan BPPK. Peran keuangan negara yang strategis menuntut sumber daya manusia (SDM) pengelola yang kompeten. BPPK menyadari kolaborasi dengan berbagai unit pemerintah, khususnya pada kesempatan kali ini dengan IPDN, sungguh sangat dibutuhkan untuk menyebarluaskan kemampuan pengelolaan keuangan negara. Kepentingan akan kebutuhan SDM pengelola keuangan negara/daerah juga selalu menjadi perhatian pimpinan di level yang lebih tinggi (DPR). BPPK juga siap melaksanakan kerja sama kolaborasi antara kampus-kampus IPDN di daerah dengan Balai Diklat Keuangan (BDK) sebagai unit BPPK di daerah. Lebih lanjut disampaikan bahwa bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan kajian bersama di bidang keuangan negara. BPPK siap melaksanakan kerja sama ini untuk mencapai *outcome* yang diharapkan yaitu pengelolaan keuangan negara/daerah yang lebih baik sehingga dapat menjaga stabilitas fiskal dan moneter di pusat dan daerah.

Dalam sambutannya, Rektor IPDN menyampaikan bahwa kerja sama ini diharapkan akan membawa manfaat pada dua level strategis. Pertama, level kebijakan, dengan adanya arahan IPDN sebagai *center of excellence* Kemendagri, maka IPDN dituntut semakin banyak membuat kajian di bidang pemerintahan dalam negeri yang beririsan dengan pengelolaan keuangan negara sebagai dasar pertimbangan proses pembuatan kebijakan. Kedua, IPDN juga berencana meningkatkan kemampuan Bahasa Inggris para praja untuk meningkatkan kemampuan bersaing menempuh pendidikan ke luar negeri. Dasar alasan tujuan pendidikan luar negeri sendiri adalah faktor *culture*, *network*, dan *knowledge* yang berbeda dari yang ada di dalam negeri. Ketiga faktor tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan membawa perbaikan yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan layanan masyarakat yang akan diberikan.

### **Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Arfiansyah Darwin  
Kepala Bagian Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Kerja Sama  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
Kementerian Keuangan





**Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Arfiansyah Darwin  
Kepala Bagian Manajemen Pengetahuan, Komunikasi, dan Kerja Sama  
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  
Kementerian Keuangan



081310004134  
kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id